



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP 39
TRIWULAN I
TAHUN 2022
INSPEKTORAT JENDERAL

**Kementerian
Perindustrian**

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, April 2022

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
I.3. Struktur Organisasi	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	9
A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	9
B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	13
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	17
III.1. Hasil yang Telah Dicapai.....	17
III.2. Analisa Capaian Kinerja	19
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	39
III.4. Langkah Tindak Lanjut	39
BAB IV. PENUTUP.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal.....	11
Tabel 2. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal.....	13
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	14
Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2022	18
Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2022	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat II	6
Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat III	7
Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV	8

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga

sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.

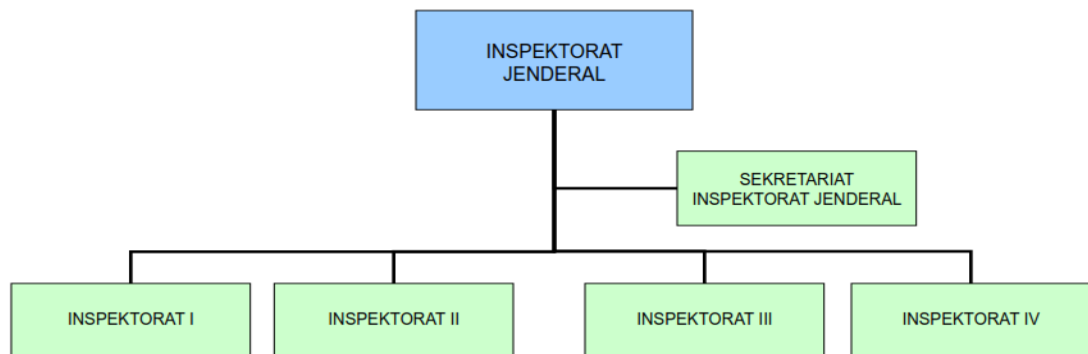
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga

dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

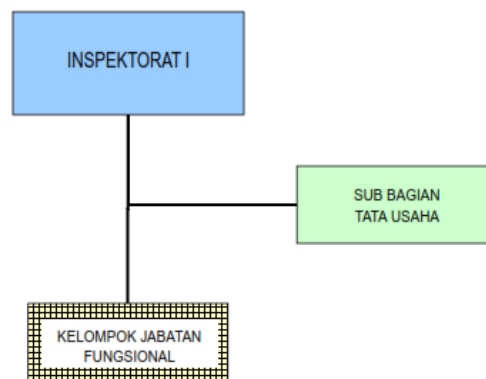
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 orang;

- b) Auditor Madya: 1 orang;
 - c) Auditor Muda: 6 orang;
 - d) Auditor Pratama: 7 orang.
- Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

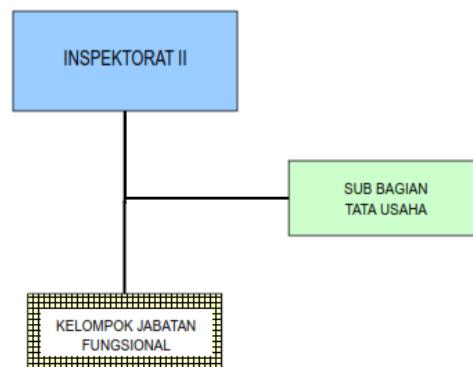
1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang Inspektur;
- b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Auditor: 14 orang;
- d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

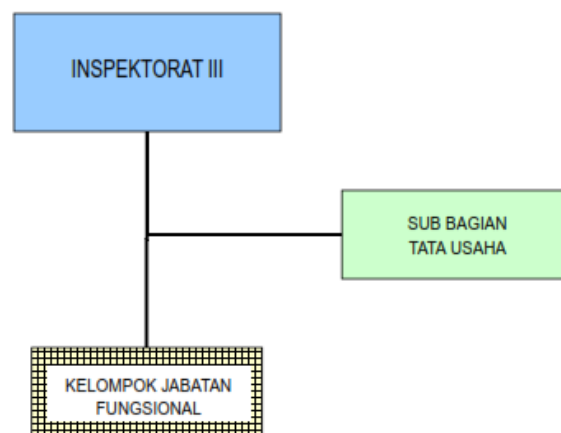
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

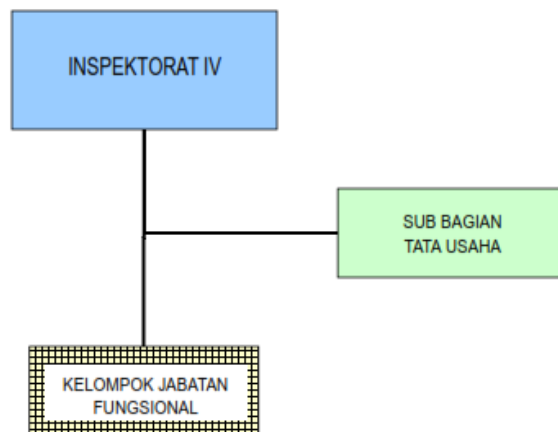
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”, dengan kegiatan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 155 Dokumen
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 23 Dokumen
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 114 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 31 Dokumen
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Dokumen - 3 Laporan - 6 Dokumen -1 Laporan - 12 Bulan -1 Layanan -105 Pegawai - 1 Laporan -10 Dokumen - 12 Bulan - 1 Dokumen

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2022 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp 40,643,630,00

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	72%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,3 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	72%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.		3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (R_{P3DN})=</p> $\frac{RAP_{3DN}}{TOTAP_{3DN}}$ <p>Keterangan: RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) $TOTAP_{3DN}$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil moneyv melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan</p> <p>Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat</p>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2022 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan I Tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak dua (2) kali dan tidak merubah pagu awal sebesar Rp 40.643.630.000. Revisi pertama dilakukan tanggal 15 Desember 2021 dan Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022, kedua revisi tersebut merupakan revisi pemutakhiran POK. Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan I ini mayoritas merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutnya, persiapan ini telah terlaksana dengan baik. Adanya kenaikan kasus Covid-19 pada awal Februari di lingkungan Inspektorat Jenderal tidak menghambat pelaksanaan persiapan kegiatan karena persiapan tersebut dapat dilaksanakan secara online. Pada bulan Maret pelaksanaan WFO telah meningkat dengan komposisi pegawai WFO 50%, efisiensi pelaksanaan kegiatan perkantoran memang sebaiknya perlu dilakukan mengingat kasus Covid-19 di dunia belum berakhir dan pegawai telah terbiasa dengan situasi *new normal* ini.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2022 (Januari - Maret) mencapai Rp. 6,266,939,990,- atau 15.42 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.40.643.630.000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW I tahun 2022 :

Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2022

	Sisa Anggaran s.d. Triwulan I	Realisasi Triwulan I		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia	
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2,108,753,000	721,062,715	34.19	100,000,000	0	1,287,690,285	61
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2,050,000,000	344,746,256	16.82	100,000,000	0	1,605,253,744	78
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2,050,000,000	356,865,735	17.41	100,000,000	0	1,593,134,265	77.7
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2,050,000,000	99,234,822	4.84	100,000,000	0	1,850,765,178	90
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	32,384,877,000	4,745,030,462	14.65	2,094,365,000	744,235,200	24,801,246,338	76.58
TOTAL	40,643,630,000	6,266,939,990	15.42	2,494,365,000	744,235,200	31,138,089,810	88.08

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2022

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	18,233,377,000	2,752,611,971	15.10	0	1,379,803,000	14,100,962,029
2	52 Belanja Barang	21,266,323,000	3,491,712,019	16.42	744,235,200	939,562,000	16,090,813,781
3	53 Belanja Modal	1,143,930,000	22,616,000	1.98	0	175,000,000	946,314,000
Jumlah		40,643,630,000	6,266,939,990	15.42	744,235,200	2,494,365,000	31,138,089,810
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>							

III.2. Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan I ini mayoritas kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan persiapan dan bersifat koordinasi, hal ini dapat dilihat pada rincian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2022 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- a. Rapat Pimpinan dengan agenda Percepatan Penyerapan Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022;

- b. Kunjungan kerja pada Proyek Modern Rice Milling Plant (MRP) - Badan Usaha Logistik (Bulog) di Magetan dan Bojonegoro tanggal 6 Januari 2022;
- c. Koordinasi Program Pengawasan pada Satuan Kerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang tanggal 13-16 Januari 2022;
- d. Memimpin rapat internal itjen dengan agenda Koordinasi Audit Masker tanggal 17 Januari 2022;
- e. Kick off pelaksanaan anggaran 2022 tanggal 21 Januari 2022;
- f. Peninjauan Implementasi SINGA di Balai Diklat Industri Yogyakarta tanggal 22-24 Januari 2022;
- g. Kick Off Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2022 dan Sosialisasi Katalog Sektor Kementerian Perindustrian tanggal 25-28 Januari 2022;
- h. Rapat Pimpinan terbatas dengan agenda Perkembangan Permenperin Standardisasi secara virtual;
- i. Rapat Pimpinan terbatas dengan agenda Lanjutan Pembahasan Rencana Program Magang (Executive Partnership Program) secara virtual;
- j. Rapat Internal terbatas secara virtual dengan topik pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka bangga buatan Indonesia;
- k. Rapat Internal terbatas secara virtual dengan topik Persiapan Bahan Ratas dengan Presiden membahas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng;
- l. Rapat dengan Kementerian PAN dan RB secara virtual dengan Topik *exit meeting* evaluasi SAKIP dengan Kemenpan RB;
- m. Rapat Internal terbatas Program Penyerapan vaksin hampir kadaluarsa secara virtual;

- n. Rapat Internal terbatas Dampak Permendag 20 bagi masing-masing Ditjen secara virtual.
- o. Rapat Pimpinan Optimalisasi Aset/BMN Kemenperin.
- p. Rapat pimpinan terkait rencana aksi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada perencanaan realisasi belanja di kemenperin;
- q. Rapat pimpinan terkait dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap Industri Nasional;
- r. Rapat Internal Terbatas melalui video conference dengan topik : Penyelesaian Perundingan Indonesia - United Arab Emirates Comprehensive Economic partnership Agreement Partnership (IUAE - CEPA);
- s. Rapat Internal terbatas melalui video conference dengan topik : Update *Purchase Manager Index* (PMI) Indonesia dan Dampak Konflik Rusia - Ukraina terhadap Industri Nasional;
- t. Rapat Internal terbatas pembahasan kebijakan distribusi minyak goreng dan persiapan bahan rapat dengan presiden terkait kebijakan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kedelai secara virtual;
- u. Rapat Persiapan Kegiatan G20;
- v. Rapat bersama Menteri Perdagangan bersama beberapa asosiasi MGS membahas kebijakan MGS curah subsidi;
- w. Menghadiri Business Matching Pengadaan PDN dan UMKM Tahun 2022 tanggal 21 - 25 Maret 2022 di Bali;
- x. Mendampingi Menteri Perindustrian menghadiri Peluncuran Chrome Book 4G LTE PT. TSM di Sofitel Bali;
- y. Rapat Pimpinan terkait Persiapan *Trade, Investment and Industri Working Group* (TIIWG);

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- Audit Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2020-2021 pada Politeknik ATI Makassar, SMAK Makassar, BDI Makassar dan SMTI Makassar;
- Reviu PIPK TA 2021 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- Audit Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2020-2021 pada SMK SMTI Bandar Lampung, Politeknik STTT Bandung, Politeknik AKA Bogor, SMAK Bogor;
- Reviu LK/BMN Semester II TA 2021 pada BPSDMI dan Sekretaris Jenderal;
- Pembinaan Pengawasan pada Politeknik IFPK Kendal;
- Reviu Buka Blokir Anggaran Sekretariat Jenderal.
- Reviu LK/BMN Semester II TA 2021 pada BPSDMI dan Sekretaris Jenderal;
- Audit Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2020-2021 pada AKOM ITPT Surakarta, Politeknik ATK Yogyakarta, SMK SMTI Yogyakarta, BDI Yogyakarta;
- Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Balai Diklat Industri Surabaya;
- Pembinaan dan Pengawasan pada STTT Bandung;
- Audit Pengelolaan Keuangan/BMN dan Penggunaan Akun Covid 19 TA 2021 pada Politeknik ATI Padang, SMK SMAK Padang, BDI padang;
- Pengawasan Rencana Pembangunan Gedung SMK SMAK Bogor dan Pembahasan Renstra BPSDMI.

- Audit Pengelolaan Keuangan/BMN dan Penggunaan Akun Covid 19 TA 2021 pada Politeknik PTKI Medan, BDI Medan, IFPK Kendal, BDI Surabaya;
- Reviu buka blokir pada BPSDMI;
- Pemantauan Pasca Pembangunan Pagar Politeknik Industri Petrokimia Cilegon;
- Pemantauan Pasca Pembangunan Pagar Plered Purwakarta;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada Politeknik STMI Jakarta, AP Jakarta, BDI Jakarta;
- Pembinaan Pengawasan pada Satuan Kerja di Jakarta;
- Pemantauan Implementasi Manajemen Resiko pada Akom Solo, SMK-SMTI Yogyakarta;
- Pemantauan Aset pada Politeknik STTT Bandung;
- Pengawasan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2020 - 2021 pada Politeknik APP Jakarta;
- Koordinasi Pengawasan Penyediaan MGS Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat Oleh PT Wilmar.

b. Inspektorat II

- Cek Fisik Dalam Rangka Audit ILMATE di Dinkes, Puskris dan RS Andalas Kota Padang Sumatera Barat;
- Melakukan Audit Cek Fisik Dalam Rangka Audit ILMATE di Dinas Kesehatan di Medan Sumatera Utara;
- Melakukan Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit ILMATE di ISOTER Semarang Jawa Tengah;
- Melakukan Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit ILMATE di BPBD Jambi;
- Melakukan Audit Cek Fisik Dalam Rangka Audit ILMATE di RS PKU Muhammadiyah Gombang Jawa Tengah;

- Melakukan Audit Cek Fisik dalam rangka AUDIT ILMATE di Dinas Kesehatan Jepara Jawa Tengah;
- Melaksanakan Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit ILMATE pada RSUD Bumi Panua Pohuwato Gorontalo;
- Melakukan Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit ILMATE di Dinkes Surabaya Jawa Timur;
- Melakukan Audit Cek Fisik dalam rangka Audit ILMATE di Kesdam Hasanudin, RSUD Andi Makassar Sulawesi Selatan;
- Melakukan Audit Cek Fisik dalam rangka Audit ILMATE di Pemkot Surakarta Jawa Tengah;
- Koordinasi Pengawasan Bidang Industri di Bekasi;
- Pengawasan terhadap Aplikasi E - Catalog di Lingkungan Industri.
- Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit ILMATE di Dinkes Yogyakarta;
- Koordinasi Program Kegiatan Dana Dekonsentrasi Pada Provinsi Jawa Barat;
- Kunjungan dalam Rangka Pengawasan IOMKI di PT Yifang Cargo Mutiara Elektronik;
- Melakukan Reviu LKBMN Tahun Anggaran 2021 Pada BPIPI Sidoarjo;
- Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit Ditjen ILMATE PT Bayu FAS Merapi;
- Mendampingi Pimpinan Dalam Rangka Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Reviu LKBMN dan PIPK Tahun Anggran 2021 Pada BPIPI Sidoarjo;
- Melaksanakan Cek Fisik Ditjen ILMATE pada gedung Penyimpanan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan;
- Melakukan Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit ILMATE di Timor Tengah Selatan NTT;
- Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Produksi Bersih dan Pengolahan Limbah IKM Tahu Kab Bogor.

- Audit Dana Dekonsentrasi IKMA TA 2021 Pada Disperindag Provinsi Aceh;
- Koordinasi Kegiatan Pendampingan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru IKM di Kabupaten Sidoarjo;
- Cek Fisik Ammdes di Kota Bogor Jawa Barat;
- Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko pada SMK SMTI Yogyakarta;
- Pendampingan kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB di Jawa Tengah;
- Melakukan Koordinasi Pendampingan kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB di Jawa Tengah;
- Audit Kewajaran Harga dalam rangka Pengadaan Masker Pada Ditjen ILMATE Inspektorat II;
- Audit Dana Dekonsentrasi Prov. Sumatera Barat, Prov Kalimantan Barat;
- Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
- Menghadiri Undangan FGD Pembahasan Usulan Revisi Permenperin di InterContinental Hotel Dago Pakar Bandung;
- Koordinasi Rapat Pedoman Penyusunan Peraturan Perundangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Pendampingan Kegiatan Fasilitasi Bimbingan Penerapan dan Sertifikasi HACCP;
- Menghadiri Acara Undangan Penajaman dan Focusing Tugas KL dalam Melaksanakan Program;
- Cek Fisik Dalam Rangka Pemantauan Penyelesaian Aset BMN Ditjen IKMA di BBLM Bandung;
- Penilaian SAKIP BPIPI Sidoarjo;
- Pengawasan Penyediaan MGS Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat Oleh PT Wilmar.

c. Inspektorat III

- Audit Program dan Kegiatan TA. 2021 pada Unit BSKJI Pusat;
- Melaksanakan Monitoring Alat Uji Halal Pengadaan TA.2021 pada Baristand Industri Padang, Baristand Industri Ambon, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Medan dan Baristand Industri Banjarbaru dalam rangka Audit Program dan Kegiatan TA. 2021 pada Unit BSKJI Pusat;
- Melaksanakan Pemutakhiran Data Terkait Program/Kegiatan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas BBPK, BBBBT, BBLM Bandung;
- Audit Khusus Pengadaan Alat Litbang Peningkatan Kemampuan Peralatan Litbangyasa Sebagai Showcase Teknologi Industri 4.0;
- Melaksanakan Cek Fisik Peralatan Mesin di BBLM Bandung Dalam Rangka Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Satker BSKJI;
- Mengkoordinir Pelaksanaan Rapat Kerja Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
- Melaksanakan Reviu LKBMN Semester II Tahun 2021 Pada Satker BBIA Bogor, Baristand Industri Medan, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, BBKB Yogyakarta, BBKKP Yogyakarta, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, BBK Bandung, BBLM Bandung, BBT Bandung, BBBBT Bandung dan BBPK Bandung;
- Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Rangka Pengawasan Perencanaan Konstruksi Fitofarmaka Pada Satuan Kerja BSKJI;

- Koordinasi dengan Tenaga Ahli Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Program dan Kegiatan Beresiko Tinggi Terkait Fitofarmaka di Satker BBBBT Bandung.
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, B4T Bandung, BBLM Bandung;
- Koordinasi Pelaksanaan Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada BBK dan BBT Bandung;
- Pengawasan Perencanaan Pembangunan Gedung Fitofarmaka pada satker BBKK;
- Pengawasan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Skala Pilot (Kerjasama BBIA dan BDPKS);
- Menghadiri Rapat Pembahasan Penyusunan Perdirjen IA tentang Mekanisme Pendaftaran Peserta Program Subsidi Minyak Goreng Curah dan Penyempurnaan Sistem Registrasi Peserta Program Subsidi Minyak Goreng Curah Subsidi di SIINAS.

d. Inspektorat IV

- Pengawasan Percepatan Pelaksanaan Program Kegiatan Ditjen KPAIL TA 2022;
- Pembahasan Outlook dan Rencana Kerja Ditjen IKFT TA 2022;
- Narasumber FGD Pengembangan Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional;
- Rapat evaluasi importasi komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri tahun 2021 Ditjen IKFT;
- Uji Lapangan Audit Masker Ditjen Industri Agro;
- FGD Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri;
- Rapat evaluasi Kegiatan TA 2021 Pusat P3DN;

- Survey Pendahuluan Ditjen Industri Agro, Ditjen IKFT; dan Ditjen KPAIL;
- Reviu Buka Blokir Ditjen Industri Agro TA 2022;
- Reviu Laporan Keuangan dan PIPK pada Direktorat Jenderal Industri Agro;
- Reviu Revisi Buka Blokir pada BDI Surabaya;
- Reviu Laporan Keuangan dan PIPK pada Direktorat Jenderal KPAIL.
- Pemetaan kegiatan risiko tinggi PPIH Tahun 2022 dalam rangka pengawalan PPIH Tahun 2022;
- Rapat Koordinasi Tim Teknis Pokja Pemantauan P3DN;
- Narasumber Kegiatan Penajaman Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam TA 2022;
- Reviu LKBMN Tahun Anggaran 2021 Pada BPIPI Sidoarjo;
- Audit Cek Fisik dalam Rangka Audit Ditjen ILMATE PT Bayu FAS Merapi;
- Audit Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro TA 2021;
- Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan pertemuan pertama Trade Investment and Industry Working Group (TIIWG-1) Presidensi G20 Indonesia 2022;
- Koordinasi pengawasan pada BPKP;
- Reviu PIPK Pada Direktorat Jenderal KPAIL;
- Reviu Laporan Keuangan TA 2021 Pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Pusat PIH, Direktorat Jenderal IKFT, Pusat P3DN;
- Pemetaan kegiatan risiko tinggi PPIH Tahun 2022 dalam rangka pengawalan PPIH Tahun 2022;
- Mengikuti Pelatihan *Microlearning Overview Analisis Pemecahan Masalah*;
- Reviu Laporan Keuangan Belanja Subsidi (BA 999 07) Kemenperin TA 2021;

- Pengawasan Pengadaan Jasa Professional Conference Organizer (PCO) dalam rangka Pertemuan ke 1 *Trade, Investment and Industry Working Group* (TIIWG) Presidensi G20 Indonesia 2022;
- Pendampingan persiapan pengadaan lelang PMO (Project Management Officer) dalam rangka implementasi wasdal (pengawasan dan pengendalian) industri, Dit KIUI Ditjen KPAIL;
- Reviu PIPK Pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal KPAIL, Direktorat Jenderal IKFT, Pusat P3DN dan Pusat PIH;
- Reviu revisi Dipa ke-22 TA 2022 Ditjen KPAIL dalam rangka Presidensi G20;
- Pendampingan persiapan pengadaan paket persiapan Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 Dit ASIPI Ditjen KPAIL;
- Rapat Koordinasi Pemantauan P3DN pada Proyek GRR Tuban;
- Rapat Tindak Lanjut dari Perintah Presiden dan Hasil Rapat Pimpinan pada Tanggal 14 Februari 2022, Serta Dalam Rangka Dukungan Pengawasan Implementasi P3DN di Kemenperin.
- Pengujian Lapangan dalam rangka Audit Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2021;
- Survei Lapangan untuk Evaluasi Pelaksanaan Program Substitusi Impor Sektor IHHP;
- Survei Lapangan untuk Evaluasi Penyusunan *Road Map* TKDN Industri Furniture dan Kesiapan Pusat Logistik Industri Furniture dalam rangka perbaikan Alur Alir Material Bahan Baku Kayu dan Rotan;
- Pencapaian Substitusi Impor serta Mendukung Pelaksanaan Neraca Komoditas untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dapat Berdaya Saing melalui Kegiatan

- Kebijakan Akselerasi Program Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2022;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Penyusunan Perdirjen IA tentang Mekanisme Pendaftaran Peserta Program Subsidi Minyak Goreng Curah dan Penyempurnaan Sistem Registrasi Peserta Program Subsidi Minyak Goreng Curah Subsidi di SIINAS;
 - Pengawasan dan Koordinasi Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM Tahun 2022;
 - Pendampingan penyelesaian Hibah BMN Ditjen IKMA di Mataram NTB;
 - Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Pertemuan ke-1 TIIWG G20 Presidensi Indonesia 2022;
 - Pengawasan Kegiatan Pemantauan Kawasan Industri RPJMN dan PSN Tahun 2022 Ditjen KPAIL;
 - Pendampingan Evaluasi Harga Minyak Goreng;
 - Pengawasan dan Koordinasi Pertemuan ke-1 TIIWG Presidensi G20 Indonesia;
 - Monitoring Harga Pasar Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah di Kota Bandung dan Menghadiri Rapat Kerja Sinkronisasi Data PPIH;
 - Pengawasan dan Koordinasi Implementasi Kontrak Termin I Maret 2022 pada Penyediaan Minyak Goreng Curah;
 - Pengawasan Penyediaan MGS Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat oleh PT Wilmar;
 - Pengawasan dan Koordinasi Pengendalian Produksi dan Penyaluran Minyak Goreng Sawit Curah Subsidi.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. Penyusunan POK awal tahun anggaran 2022;

- b. Telah dilaksanakan rapat terkait adanya perubahan pada aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Rapat ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran untuk menjelaskan terkait tatacara revisi anggaran. Notulensi dari rapat ini telah disampaikan kepada para Inspektur melalui Nota Dinas nomor 101/IJ-IND.1/PR/II/2022 tanggal 16 Februari 2022;
- c. Telah dilakukan pengisian Konsep Angka Dasar 2023 pada aplikasi Krisna dengan progres 100%;
- d. Telah dilakukan pengisian Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi Sakti dengan progres 100%;
- e. Menyusun KAK dan RAB kegiatan program dan anggaran pagu Indikatif dengan progres 100%;
- f. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester II Tahun 2021. Laporan Telah Disusun Sesuai Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti;
- g. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan IV Tahun 2021. Laporan Telah Disusun Sesuai Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang telah disampaikan;
- h. Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal. Telah dilaksanakan koordinasi dan telah diverifikasi auditor dokumen dengan auditor pemeriksa;
- i. Inventarisasi data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Telah dilakukan sesuai dengan dokumen tindak lanjut yang telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal;
- j. Pre Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2021 oleh BPK-RI. Telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022;

- k. Rapat Capaian Kinerja Substitusi Impor Tahun 2021 Kementerian Perindustrian. Telah dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Januari 2022;
- l. Persiapan Penyusunan Laporan APIP Tahun 2021 (pengumpulan data TLHP, data diklat dan PKS, Hasil Pengawasan 2021, Identifikasi Kegiatan Pengawasan 2021 dll);
- m. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada BDI Denpasar;
- n. Penyusunan Timeline pelaksanaan PMPZI 2022;
- o. Penyusunan draft Surat Permintaan Pegawai yang akan Naik Pangkat Periode April 2021;
- p. Koordinasi Penandatanganan Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja (DP3) Pegawai yang akan naik pangkat dan Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- q. Penyusunan draft SKP berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dan Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 untuk contoh;
- r. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 berdasarkan arahan Biro Perencanaan dengan memasukkan Indikator Kinerja Baru;
- s. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Eselon I dan Eselon II Inspektorat Jenderal;
- t. Penyusunan Revisi II Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal;
- u. Penyusunan Laporan PP39 TW IV Eselon I dan Eselon II Inspektorat Jenderal
- v. Pengumpulan data dan dokumen penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- w. Studi Banding Penerapan TABK ke Kementerian Keuangan;
- x. Penilaian SKP 2021 dan Penyusunan SKP 2022;

- y. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- z. Penyelesaian laporan perbendaharaan rutin tiap bulan.
- aa. Telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan PP Nomor 29 Tahun 2018;
- bb. Pengukuran indikator kinerja Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dilakukan hanya pada kegiatan Audit dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (*Risk Based Audit*) dalam penetapan sampling audit. Pada tahap ini ingin diketahui dasar dan analisis yang digunakan auditor dalam menentukan sampling audit;
 - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (*screenshoot* penggunaan aplikasi);
 - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel, SQL, Access, dll) *Bukti Hasil Telaahan pada semua kegiatan Pengawasan;
 - Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam, Gdrive, dll);
 - Penyusunan Ikhtisar, *sort, merge, split, ratio* untuk analisis data;
 - Tahap Pelaporan menggunakan Ms. Office dll.
- cc. Telah disusun Tim kerja Non Tugas dan Fungsi dalam rangka penguatan pengawasan sebagai berikut:
 - Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - Tim Penggerak Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Dan Kedisiplinan (5k) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;

- Tim Pengelola Arsip Dan Ketatausahaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Tim Pengelola Sarana Dan Prasarana di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Tim Pengelola Website di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Tim Perumus Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Tim Reformasi Birokrasi dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (*Internal Audit Capability Models/IACM*) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Tim Penyiapan Bahan Materi Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Tim Pengelola Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

dd. Penyusunan *timeline* dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

ee. Koordinasi dengan Auditor Pemeriksa untuk verifikasi kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pengawasan internal dan telah dilaksanakan koordinasi dan telah diverifikasi auditor dokumen dengan auditor pemeriksa;

ff. Penyusunan laporan capaian Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan Tingkat Kementerian;

gg. Penyampaian laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 dari Kemen PANRB;

hh. Sosialisasi SKP Juli-Desember 2021 berdasarkan Permenpan dan RB No 8 Tahun 2019;











- ii. Penyampaian Nota Dinas perubahan kelas jabatan Auditor ke Biro OSDM;
- jj. Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I dan Eselon II Inspektorat Jenderal;
- kk. Telah dilakukan inventarisasi data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, sesuai dengan dokumen tindak lanjut yang telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal;
- ll. Penyusunan Laporan APIP Tahun 2021;
- mm. Menindaklanjuti amanat Menteri Perindustrian yang tertuang pada keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1474 Tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Tim Pengawas Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi pembentukan tim pengawas internal Inspektorat Jenderal serta dan koordinasi dengan K/L lain serta Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- nn. Rapat Internal Inspektorat Jenderal terkait *draft* Permenperin tentang Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah;
- oo. Koordinasi awal permintaan penambahan anggaran Inspektorat Jenderal dalam rangka pengawasan distribusi minyak goreng curah sesuai Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor : 67/IJ-IND/PR/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 hal Usulan Tambahan Anggaran Kegiatan Pengawasan Ketersediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- pp. Sosialisasi penerapan Standar Biaya Keluaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- qq. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan internal ke 10 (sepuluh) satker, yaitu SMTI Padang, BDI Padang, BDI Medan, PTKI Medan, Baristand Palembang, SMTI Pontianak, Poltek










Industri Logam Morowali. AKOM Bantaeng, BDI Denpasar dan BBT Bandung;

- rr. Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal;
- ss. Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan;
- tt. Koordinasi persiapan penilaian SAKIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dimana penilaian untuk eselon II dan UPT akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua April 2022.
- uu. Rapat Koordinasi teknis pengawasan intern atas akuntabilitas penyelenggaraan GPDRR (*Global Platform for Disaster Risk Reduct*) undangan dari BPKP Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan kebudayaan tanggal 4 Maret 2022;
- vv. Rapat Koordinasi SOP pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;
- ww. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan pengaduan Kementerian dan Lembaga melalui SP4N-LAPOR undangan dari Kementerian PAN dan RB ;

Adapun progres capaian dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan I diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW I 2022

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.3%	Masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK	
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	90%	Belum ada pengaduan hingga akhir Maret	
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Masih dalam proses pelaksanaan	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	72%	Belum dapat diukur, masih dalam proses persiapan	
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Belum dilaksanakan	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Telah selesai penyusunan LAKIP 2021, IACM masih dalam proses pelaksanaan	
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	78%	Masih dalam proses pelaksanaan	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	Masih dalam proses pelaksanaan	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1. Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	Masih dalam proses pelaksanaan	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	Pada bulan April akan dilakukan Penilaian Dokumen SAKIP Eselon II.	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	1. Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	90%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		2. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		3. Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		4. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	92%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	75	Masih dalam proses pelaksanaan	
8.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	Masih dalam proses pelaksanaan	
		2. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		3. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	76%	Masih dalam proses pelaksanaan	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I Tahun 2022, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

- 1) Terdapat perubahan pada output form A yang terdapat di Aplikasi PP 39, sehingga sub kegiatan pada Inspektorat Jenderal tidak dapat di analisa realisasi keuangan dan realisasi fisiknya;
- 2) Terdapat SPTJB yang belum diinput nomor dan tanggal oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Karena belum terbitnya SP2D.
- 3) Pada Monev Tapkin Inspektorat Jenderal secara total sub kegiatan belum sesuai dengan POK, sehingga terjadi ketidaksesuaian total Pagu Anggaran.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan I ini dan bertepatan dengan era *new normal*, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realiasi anggaran sesungguhnya;
2. Bekerjasama dengan Pusdatin untuk memperbaiki aplikasi PP 39 yang ada pada intranet;
3. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan pada awal tahun;
4. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik online maupun secara langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengatur perencanaan kegiatan;
6. Koordinator kegiatan agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan
7. Untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan P3DN, maka berdasarkan hasil rapat, Inspektorat Jenderal perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menetapkan rencana pengawasan dalam mengawal capaian Produk Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian;
 - Masing-masing Inspektorat perlu Menyusun Rencana Aksi terkait pengawasan P3DN pada masing-masing unit kerja cakupan tugas;
 - Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai koordinator Tim Monev untuk dapat memastikan terlaksananya monev P3DN dan melaporkan hasil monev setiap semester.
8. Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1474 Tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Tim Pengawas Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Inspektorat Jenderal perlu menyusun Tim Pengawasan Minyak Goreng dan teknis pengawasannya;
9. Kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal saat ini memang Pengawasan Penyediaan Minyak Goreng Sawit Curah, namun demikian kegiatan pengawasan lainnya harus tetap berjalan.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan I Tahun 2022 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 (Januari-Maret) mencapai Rp 6,266,939,990, - atau 15.42 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 40,643,630,000, -. Dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp 2,494, 365,000,- dan outstanding kontrak Rp 744,235,200,- maka dana yang tersedia saat ini Rp 31,138,089,810,-. Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan. Sehingga di akhir tahun 2022, perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Informasi capaian kinerja Triwulan I ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2022 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN



Kegiatan Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. SP.1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU Pagu = Rp. 0	1,3 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 Persen
	S1.2 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti Pagu = Rp. 0	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,1 Persen
	S1.3 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU Pagu = Rp. 0	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62 Persen
Total Pagu = Rp. 0													
2. SP.2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	S2.1 - Nilai RB Area Penguatan Pengawasan Pagu = Rp. 0	72 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 Persen
	S2.2 - Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU Pagu = Rp. 0	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 Level
Total Pagu = Rp. 0													
3. SP.3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	S3.1 - Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
	S3.2 - Capaian IACM Itjen Pagu = Rp. 0	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Level
	S3.3 - Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) Pagu = Rp. 0	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Total Pagu = Rp. 0													
4. SP.4 - Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	S4.1 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *) IKU Pagu = Rp. 0	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75 Persen
Total Pagu = Rp. 0													
5. SP.5 - Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif													
	SS5.1 - Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0	76 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Total Pagu = Rp. 0													
6. SP.6 - Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
	SP6.1 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0	78,4 Nilai	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Nilai
Total Pagu = Rp. 0													

7. SP.7 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
SP7.1 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT Pagu = Rp. 0	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
SP7.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Pagu = Rp. 0	100 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
SP7.3 - Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0	72 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
SP7.4 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
SP7.5 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0	74,5 Nilai	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Nilai
Total Pagu = Rp. 0													
8. SP.8 - Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas													
SP8.1 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0	73 Indeks	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Indeks
SP8.2 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan Pagu = Rp. 0	65 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
SP8.3 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat Pagu = Rp. 0	76 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Total Pagu = Rp. 0													

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian